BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*)

Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya (Donaldson dan Davis, 1991).

Berdasarkan teori *stewardship* kedua kelompok yaitu principal dan steward bekerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai keinginan mereka. *Principals* merekrut pegawai berdasarkan kemampuan mereka dalam menggerakkan sumber daya organisasi guna memaksimalkan *stakeholder benefit*, Berdasarkan asumsi teori *stewardship* yang menyatakan bahwa manajer akan berusaha mengelola sumber daya secara maksimal dan mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan organisasi dan bekerja berdasarkan pemikiran bahwa keuntungan (pemenuhan kebutuhan) *steward*

dan *principal* berasal dari perusahaan yang kuat secara organisasi dan secara ekonomi.

Steward yang sukses dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang lain, karena sebagian besar *shareholder* memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik melalui peningkatan kemakmuran yang didapatkan organisasi. S*teward* yang berkomitmen dengan organisasi termotivasi untuk memaksimumkan kinerja perusahaan, disamping dapat memberikan kepuasan kepada kepentingan *shareholder*.

Tetapi pada akhirnya eksekutif bekerja untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan sosiologis mereka sendiri. Eksekutif tidak berusaha meningkatkan nilai bagi pihak *stakeholder*, oleh karena itu, nilai tambah seperti pembayaran bunga kepada kreditor dan pembayaran pajak kepada pemerintah merupakan hal diluar keinginan *stakeholder*. Di lain sisi, nilai tambah tersebut dianggap sebagai efek samping dari usaha meningkatkan kesejahteraan pemilik dan keuntungan manajer. Dari hal ini akan timbul keagenan (agency theory).

2. *Agency Theory*

Menurut Mardiasmo (2004) *Agency Theory* menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu : 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal) dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horisontal).

Agency theory menjabarkan tentang hubungan antara pihak prinsipal dan agen, dimana prinsipal adalah pihak yang memberikan amanah kepada pihak agen. Prinsipal menyerahkan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada agen dimana hak dan kewajiban kedua belah pihak dijelaskan dalam suatu perjanjian kerja yang saling menguntungkan. Pemilik menjadi prinsipal ketika mereka mengkontrak eksekutif untuk mengurus perusahaannya. Sebagai agen, eksekutif secara moral bertanggungjawab memaksimalisasikan kegunaan pemegang saham. Eksekutif menerima status agen karena anggapan pada peluang memaksimalkan kegunaannya.

Keterkaitan *agency theory* dalam penelitian ini atau dalam kaitannya dengan pemerintah daerah adalah masalah keagenan muncul ketika pemrerintah daerah sebagai agen cenderung memaksimalkan *self interest*-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat. Teori keagenan juga menyatakan bahwa agen bersikap oportunis dan cenderung tidak

menyukai resiko. Tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak agen tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan *stakeholders* terhadap kinerja mereka. Berdasarkan uraian tersebut pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Pelaporan Keuangan Pemerintahan

Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor) dan peraturan yang berlaku termasuk PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum). Laporan keuangan hanyalah salah satu media dalam penyampaian informasi.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik diperlukan juga tata kelola pemerintah yang baik pula yaitu dengan menerapkan *good govermance governance*. *Good govermance governance* itu sendiri menurut World Bank

sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. *Good govermance governance* mempunyai beberapa prinsip , yaitu :

a. Prinsip Kewajaran (Fairness), menurut prinsip ini laporan keuangan pemerintah dikatakan wajar apabila memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan yang wajar berarti bebas dari salah saji material dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
b. Prinsip Akuntabilitas, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dan menjadi alat pengawasan yang efektif.
c. Prinsip Transparansi, pemerintah dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi yang jelas, akurat, tepat waktu, dan dapat dibandingkan. Informasi yang disajikan tersebut menunjukkan kualitas laporan keuangan dan kepercayaan stakeholder tergantung pada kualitas informasi yang disajikan pemerintah.
d. Prinsip Responsibilitas, berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah juga dituntut untuk mematuhi aturan dan hukum yang berlaku

Dengan menerapkan prinsip *good govermance governance* akan menghasilkan tata kelola pemerintah yang baik , terciptanya akuntabilitas publik yang lebih transparan dan akuntable , dan tercapainya pelaporan keuangan yang baik pula .

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

   Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi *(intergenerational equity)*

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun laporan keuangan pokok yang harus disusun oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan meliputi : (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Kualitas Informasi

Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi harus bermanfaat bagi para pemakai sama aja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono, 2005)

a. Keterandalan

Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukan informasi yang benar dan jujur . Karakteristik kualitas merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Salah satu faktor

karakteristik kualitas pokok laporan keuangan adalah keterandalan. Informasi dianggap andal jika mendapat diverifikasi, netral, dan disajikan secara tepat serta bebas dari kesalahan dan bias. Keandalan sangat di perlukan bagi individu – individu pemakai yang tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mengevaluasi isi faktual dari informasi

b. Ketepatwaktuan

Tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Faktor – faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu. Batas waktu penyampaian laporan selambat – selambatnya 6 (enam) tahun bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2005).

Menurut Mardiasmo (2002) laporan keuangan disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengembilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusaan tersebut. Menurut Johan Wahyudi (2012) menyatakan bahwa informasi dalam laporan keuangan akan dapat bermanfaat bagi para penggunanya apabila disampaikan dengan tepat waktu.

Ketepatwaktuan pelaporan keuangan bukan hanya dibutuhkan oleh organisasi sektor publik saja, tetapi organsasi non sektor publik juga

membutuhkan hal yang sama yaitu ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Ketepatwaktuan menunjukan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan yang pada gilirannya mungkin akan mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai (Respati dalam johan, 2011)

5. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Menurut Wiley (2002) dalam Azhar (2007) mendefinisikan bahwa "Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut". Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Susilo (2002) dalam Johan Wahyudi (2011) " sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dan tujuannya ". Manusia merupakan bagian dari sumber daya yang di butuhkan oleh perusahaan/organisasi, namun pelaksanaan kebijakan manajemen masih banyak yang belum memperhatikan pentingnya peran sumber daya manusia

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Definisi TI secara lengkap dinyatakan oleh Martin et al dalam Noviari (2009), yaitu teknologi komputer yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi serta teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan informasi. Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al*., 2000). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masysrakat (Hamzah dalam Winidyaningrum, 2010).

7. Sistem Pengendalian Intern

Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Menurut Wilkinson *et al* (2000) dalam Indriasari (2008), sub komponen dari aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah (a) perancangan yang memadai dan penggunaan dokumen-dokumen dan catatan-catatan bernomor, (b) pemisahan tugas, (c) otorisasi yang memadai atas transaksitransaksi, (d) pemeriksaan independen atas kinerja, dan (e) penilaian yang tepat atas jumlah yang dicatat.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

Penelitian yang dilakukan oleh Celvina dan Rahmawati (2010) , hasil penelitian menunjukan bahwa sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keteandalan pelaporan keuangan pemerinta daerah, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah .

Penelitian yang dilakukan Susilo Prapto (2010) hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, pengendalian intern akuntansi berpengaruh sigifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dita Arfianti (2011) menunjukan bahwa sistem pengendalia intern berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan tidak berpengaruh. Kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan

keuangan pemerintah daerah, sedangkan pengawasan daerah tidak berpengaruh.

TABEL 2.1.
Tabel Hasil Penelitian Terdahulu

Nama , Tahun , dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian dan Alat Analisis	Hasil
Celviana dan Rahmawati (2010) " Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah dengan Variabel Intervebing Pengendalian Intern Akuntansu (Studi Empiris di Pemda SUBOSUKAWON OSRATEN) "	Variabel independen adalah sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi , pengendalian intern akuntansi sebagai variabel intervening . Variabel dependen adalah keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan . Alat anaslisi : Uji validitas , reliabilitas , dan uji asumsi klasik	Sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi . Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah , sedangkan sumber daya manusia tidak berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatwaaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah
Susilo Prapto (2010) " Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Sragen) "	Variabel Independen adalah pemanfaatan teknologi informasi , dan pengendalian intern akuntansi . Variabel dependen adalah keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah . Alat analisis : Uji validitas , uji reliabilitas , dan uji asumsi klasik	Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah , pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah .

Nama , Tahun , dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian dan Alat Analisis	Hasil
Dita Arfianti (2011) “ Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang “	Variabel Independen adalah kualitas sumber daya manusia , pemanfaatan teknologi informasi , sistem pengendalian intern , dan pengawasan keuangan daerah	Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah , sedangkan kualitas sumber daya manusia , pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh . Di samping itu , kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah , sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh .

Perbedaan Penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah

a. Variabel penelitian, adanya penambahan variabel independent yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
b. Alat analisis
c. Objek dan tahun dari ketiga penelitian

1. Hubungan Sumber Daya Manusia Dengan Kualitas Pelaporan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian Indriasari (2008) membuktikan dalam penelitian bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterpautan dan keterandalan informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Hilir provinsi Sumatera Selatan. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagai sebuah

implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi. Bukti penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, namun penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh kapaistas sumberdaya manusia terhadap ketepatwaktuan penyampaian informasi dalam laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H1a : Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

H1b : Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Terhadap Ketepatwaktuaan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Kualitas Pelaporan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi

informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada organisasi sektor publik menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, *multi-processing* (Indriasari, 2008).

Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H2a : Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

H2b : Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Ketepat- waktuaan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3. Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Kualitas Pelaporan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penjelasan PP Nomor 60 Tahun 2008 yang mendefinisikan pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi

melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keterandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan .

Penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 2001 pada SA seksi 319 par 06 mengartikan pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan laporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.Dengan demikian semakin tinggi pengendalian intern dalam instansi pemerintah maka dapat meningkatkan ketepatwaktuan pelaporan keuangan sesuai dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H3a : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh Positif Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

H3b : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpegaruh Positif Terhadap Ketepatwaktuaan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

C. Model Penelitian

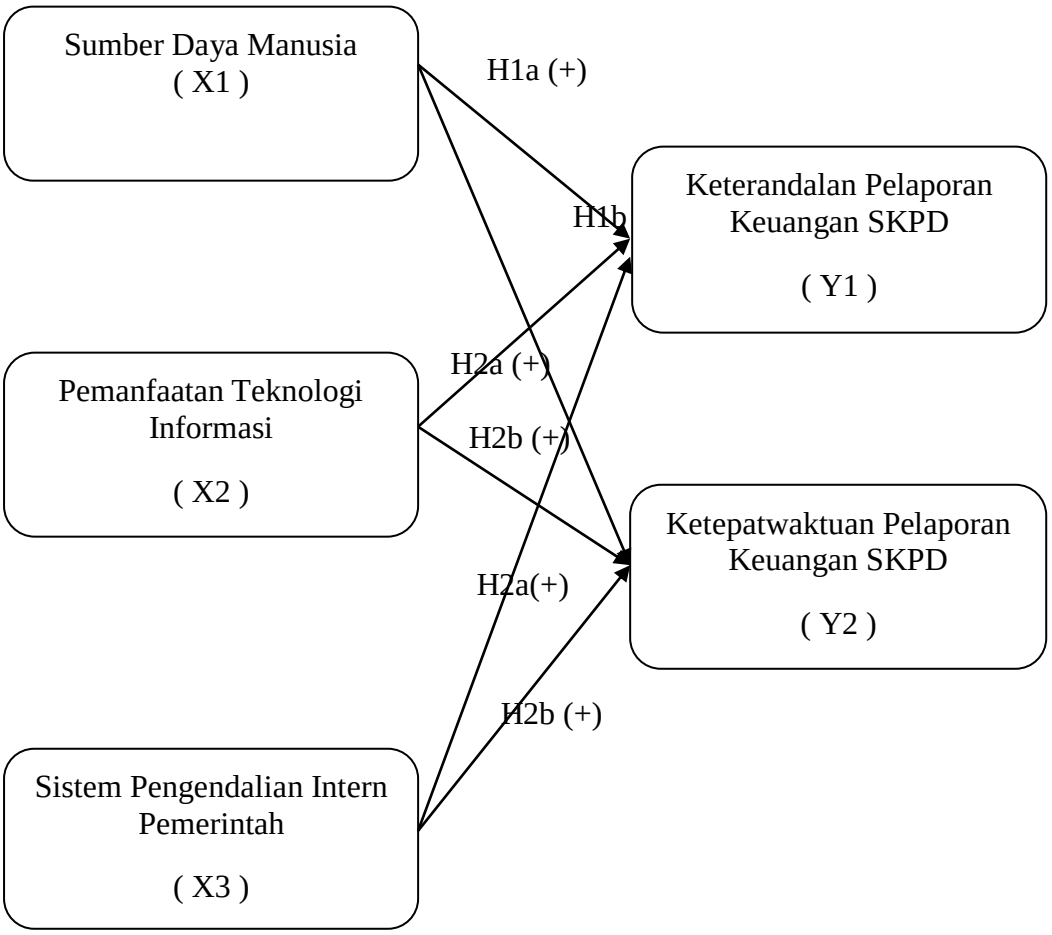

Gambar 2.1.

Model Penelitan

Model Penelitian Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia , Pemanfaatan Teknologi Informasi , dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.